

Submitted:  
27 November 2022  
Revised:  
29 November 2022  
Published:  
30 November 2022

## CONTACT

Correspondence Email:  
[noviyana.arifin@gmail.com](mailto:noviyana.arifin@gmail.com)

Address:  
Jl. Ir. Sutami No.36,  
Ketingan, Kec. Jebres,  
Kota Surakarta, Jawa  
Tengah, kode pos 57126

## SEJARAH LOKAL DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

NOVIYANA SARI<sup>1</sup>, SERLY FATMA YANTI<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Lampung

## ABSTRACT

*The diversity of the Indonesian is not just aspects of culture, language, ethnicity, but also the process of social change of society and history in each region has differences. History is not a blank and rigid space, departing from an autocratic of the History Education curriculum which has some weakness, this paper focuses on the study of the lack of local historical content in the curriculum of historical education and attempts to initiated discourses to be an alternative to enrich the content of history education with local history without ruling out Indonesia's national history. The local history can be a consideration, in addition to touching the localities and being closer to the students, local history learning can also be a means to preserve local wisdom and indigenous cultures in each region. Decentralization of education as a delegation of authority to local authorities provides opportunities for the application of local history in the curriculum of history subjects. Education policy and design of local history education curriculum can be devolved by regional authorities, cultural and historical communities, and Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru (MGMP / KKG).*

Keywords: Local History, Decentralization of Education, History Education.

## ABSTRAK

Keberagaman bangsa Indonesia ini bukan sekedar dari aspek kebudayaan, bahasa, etnisitas, namun juga proses perubahan sosial masyarakat dan sejarah di setiap daerah memiliki perbedaan. Sejarah bukanlah ruang kosong dan kaku, berangkat dari autokritik tentang kurikulum Pendidikan Sejarah yang memiliki beberapa kekurangan, tulisan ini berfokus kepada salah satu kelemahannya tentang kurangnya konten sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan sejarah dan mencoba mewacanakan satu alternatif untuk memperkaya muatan materi sejarah dengan sejarah lokal tanpa mengesampingkan sejarah nasional Indonesia. Pengajaran sejarah lokal dapat menjadi pertimbangan, selain menyentuh aspek lokalitas dan lebih dekat dengan peserta didik, pembelajaran sejarah lokal dapat pula menjadi sarana untuk melestarikan kearifan lokal dan budaya asli di setiap daerah. Desentralisasi pendidikan sebagai pelimpahan wewenang kepada otoritas

daerah memberikan peluang bagi penerapan Sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah di daerah. Kebijakan khusus dan desain kurikulum pendidikan sejarah lokal dapat dilimpahkan kepada otoritas lokal dan komunitas pegiat budaya dan kesejarahan.

Kata Kunci: Sejarah Lokal, Desentralisasi Pendidikan, Pendidikan Sejarah

## **I. PENDAHULUAN**

Pada masa Orde Baru sekolah-sekolah negeri dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk membentuk masyarakat serta stabilitas yang diinginkan oleh rezim. Setelah perluasan sistem publik yang dramatis yang terjadi di tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia, sekolah menjadi alat yang tepat untuk mengkomunikasikan ideologi nasional yang seragam, pandangan sejarah, dan nilai-nilai kepada pemuda Indonesia. Mengenai sekolah sebagai jalur penting untuk integrasi nasional, pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk memastikan bahwa anggota komunitas sekolah mengenali identitas mereka sebagai orang Indonesia dan menghormati hubungan mereka dengan bangsa.

. Setelah bertahun-tahun diskusi formal tentang prospek desentralisasi kontrol atas kurikulum, pada tahun 1994 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (MOEC) mewajibkan semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di negara ini untuk mengalokasikan 20 persen dari total jam pelajaran untuk mata pelajaran yang dirancang secara lokal.<sup>1</sup> Mengingat sifat pemerintah Indonesia yang sangat sentralistik dan top-down, Kurikulum Muatan Lokal (LCC) program mewakili keberangkatan yang signifikan dari kebijakan pendidikan sebelumnya di Indonesia tidak hanya dalam hal isi kurikuler tetapi juga dalam peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada pendidik. Untuk pertama kalinya, sekolah tidak menerapkan kurikulum standar yang seluruhnya disusun oleh tim ahli di Jakarta. Selain itu, Kemdikbud mendorong para guru untuk bereksperimen dengan pedagogi inovatif yang dirancang untuk memeriahkan pengajaran. Terakhir, dokumen LCC mengidentifikasi strategi untuk mengelola program baru yang mendukung struktur otoritas yang lebih demokratis dan memperluas lingkaran aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dengan LCC, kendali atas kurikulum dilimpahkan ke provinsi, kabupaten, dan sekolah. Penataan kembali itu menyusun kembali peran yang akan dimainkan oleh individu yang berada di semua tingkatan sistem. Tetapi orang-orang yang definisi pekerjaannya paling terpengaruh secara langsung adalah guru. Seperti yang ditekankan oleh banyak pejabat Kemdikbud kepada saya, keberhasilan LCC bergantung pada upaya guru kelas. Instruktur, yang sebelumnya diharapkan berfungsi sebagai agen yang setia dari arahan kebijakan, tiba-tiba diminta untuk bertindak sebagai "pengrajin independen", menggunakan istilah Michael Huberman, di sekolah mereka. Namun tidak jelas bagaimana para pendidik itu akan menanggapi tantangan yang diberikan kepada mereka. Apakah para guru tertarik untuk memperkuat otonomi dan pengaruh mereka di sekolah? Apakah

mereka dilengkapi dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mencapai transformasi profesional yang didorong oleh Kemdikbud? Bagaimana tradisi Indonesia yang secara kuat memusatkan kekuasaan di pusat membentuk respons lokal terhadap LCC? Jenis dukungan apa yang akan diterima guru dari pejabat tingkat atas yang secara sukarela berbagi kekuasaan?

Keputusan Kemdikbud untuk membubarkan listrik ke daerah tidak dilakukan secara terpisah. LCC merupakan salah satu dari daftar panjang proyek desentralisasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an. Semua sektor pemerintahan terpengaruh oleh dorongan untuk desentralisasi ini, yang oleh Bank Dunia disebut sebagai “masalah yang menentukan atau menghancurkan” bagi negara. Pemerintah Indonesia melangkah lebih jauh dengan menyewa konsultan internasional untuk bekerja penuh waktu mengoordinasikan semua proyek desentralisasi yang dilakukan oleh berbagai kementerian pemerintah dan untuk menjajaki strategi guna meningkatkan upaya implementasi lokal. Jelas, ada dorongan politik yang kuat untuk mempromosikan desentralisasi pendidikan di Indonesia

Selama periode itu, serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk mendelegasikan wewenang ke provinsi, kota, dan desa diberlakukan. Meskipun pemerintah terkadang mengalami kesulitan untuk menepati janjinya untuk menyerahkan kewenangan kepada daerah-daerah otonom, dukungannya terhadap proyek-proyek desentralisasi tidak berkurang. Puncak dari tren ini adalah pengesahan Undang-Undang 22 dan 25 pada tahun 1999 yang memberikan kekuasaan politik dan hak memungut pendapatan kepada kabupaten dan kota di Indonesia mulai bulan Januari 2001. Pada akhir abad ke-20, pertanyaannya bukan lagi apakah atau bukan Indonesia yang akan menganut desentralisasi, melainkan kecepatan perubahan dan dampak reformasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Keanekaragaman budaya, bahasa, etnis, dan agama Indonesia yang luar biasa telah lama menantang individu-individu yang bertanggung jawab untuk mengatur nusantara. Dibuat pada tahun 1945, negara ini terdiri dari lebih dari 13.000 pulau, 200 juta orang, 50 kelompok etnis, dan 200 bahasa daerah. Sejak kemerdekaan, para politisi dihadapkan pada dilema tentang bagaimana memanfaatkan keberagaman itu tanpa merusak kohesi nasional. Selama 60 tahun terakhir, pemerintah telah bereksperimen dengan berbagai tingkat otoritas terpusat versus desentralisasi. Dalam beberapa kesempatan, para pemimpin nasional mengisyaratkan bahwa kekuasaan akan dibagi dengan daerah, hanya untuk mengonsentrasikan kembali kekuasaan di Jakarta. Pada akhir abad ke-20, Indonesia menjadi lebih tersentralisasi dibandingkan titik mana pun dalam sejarah bangsa ini. Padahal selama periode itu, pemerintah secara terbuka mendukung langkah-langkah desentralisasi untuk diterapkan di semua sektor pemerintahan. Kontradiksi tersebut merupakan representasi dari ketegangan antara retorika resmi dan tindakan yang berakar pada peran pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat Indonesia.

Pada awalnya, Indonesia tampak menuju struktur otoritas yang tersebar. Undang-undang desentralisasi negara yang pertama, Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah,

diundangkan pada tahun 1948. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Dasar 1945, sebuah dokumen yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden, digantikan oleh undang-undang baru yang melindungi kebebasan warga negara. warga negara individu dan membentuk parlemen yang dipilih secara populer yang dirancang untuk berfungsi sebagai pengawas otoritas presiden. UUD 1950 menyerukan “pembagian Indonesia menjadi daerah besar dan kecil dengan hak untuk mengatur urusan mereka sendiri. Divisi-divisi ini harus diberikan otonomi sebesar mungkin untuk mengelola urusan mereka sendiri.”<sup>20</sup> Menurut Michael Malley, pada saat itu “demokrasi konstitusional Indonesia telah menyelesaikan, setidaknya dalam hukum dan sebagian dalam praktik, gesekan antara pretensi kesatuan dari pusat dan otonomi daerah yang sesungguhnya.” Perundang-undangan yang diadopsi selama pertengahan 1950-an melanjutkan tren penyebaran kekuasaan di seluruh nusantara. Satu undang-undang menyerukan pembentukan majelis provinsi dan distrik yang dipilih secara populer; yang lain mensyaratkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan persentase tertentu dari sumber daya fiskalnya kepada pemerintah daerah

Namun, audiens terbesar dan terpicat yang tersedia bagi para pemimpin Orde Baru terletak di sekolah-sekolah nasional. Menyusul ekspansi dramatis dari sistem publik yang terjadi pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia, ruang kelas bangsa memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan ideologi nasional yang seragam, pandangan sejarah, dan seperangkat nilai kepada pemuda Indonesia. Mengenai sekolah sebagai penghubung penting untuk integrasi nasional, pemerintahan Orde Baru berusaha keras untuk memastikan bahwa anggota komunitas sekolah mengakui identitas mereka sebagai orang Indonesia dan menghormati ikatan mereka dengan negara.

Di bidang pendidikan, proses pelimpahan tanggung jawab kurikulum ke luar Jakarta mulai digalakkan pada tahun 1980-an. Seorang menteri pendidikan pada saat itu, penggemar berat konsep “link and match”, menganjurkan peralihan ke kurikulum yang lebih dirancang secara lokal.<sup>37</sup> Setelah bertahun-tahun berdiskusi informal tentang prospek pengintegrasian komponen lokal ke dalam kurikulum nasional, Kemdikbud melakukan studi kelayakan tentang topik ini pada tahun 1986. Garis besar program disiapkan dan diujicobakan di tiga provinsi. Tahun berikutnya, uji coba tahap kedua dilakukan di tiga provinsi tambahan. Pada tahun 1994, setelah banyak mengutak-atik dan merevisi, LCC akhirnya menjadi bagian tersendiri dari kurikulum nasional dan diimplementasikan di sekolah-sekolah di seluruh negeri..

Tantangan terbesar pendidikan di Indonesia tidak lagi berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan Layanan Pendidikan. Pemerataan layanan pendidikan (equity of access to education service) memastikan bahwa penduduk Indonesia terbebas dari kendala geografi dan keuangan untuk mendapatkan hak dasar layanan pendidikan. Satuan pendidikan harus terbangun di tingkat desa dan kecamatan serta daerah terpencil dan kepulauan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah. Pemerataan

layanan pendidikan menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan penduduk yang berstatus sosial-ekonomi lemah.

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan. Meskipun pemerintah telah memberi perhatian besar pada bidang pendidikan melalui penyediaan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN, peran masyarakat termasuk sektor swasta didorong untuk mendukung pembangunan pendidikan. Peran masyarakat dan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan pendidikan juga didorong dalam hal penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan swasta memberi sumbangan terhadap peningkatan pemerataan layanan dan partisipasi pendidikan.

Pada masa Orde Baru sekolah-sekolah negeri dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk membentuk masyarakat serta stabilitas yang diinginkan oleh rezim. Setelah perluasan sistem publik yang dramatis yang terjadi di tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia, sekolah menjadi alat yang tepat untuk mengkomunikasikan ideologi nasional yang seragam, pandangan sejarah, dan nilai-nilai kepada pemuda Indonesia. Mengenai sekolah sebagai jalur penting untuk integrasi nasional, pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk memastikan bahwa anggota komunitas sekolah mengenali identitas mereka sebagai orang Indonesia dan menghormati hubungan mereka dengan bangsa.

Dampak historis dari perjalanan politik negeri ini berpengaruh juga terhadap penulisan sejarah serta efek lanjutnya terhadap kurikulum sejarah yang diajarkan di sekolah. Kelemahan yang terdapat dalam kurikulum sejarah akan dijelaskan pada bagian pembahasan, dan di tulisan ini mencoba mengerucut kepada salah satu permasalahan yaitu kurangnya materi sejarah lokal dalam muatan materi di kurikulum sejarah di sekolah, serta mencoba menawarkan gagasan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ungkapan yang sudah tidak asing lagi dalam kecenderungan penulisan sejarah Indonesia yang “Jawasentris” berpengaruh juga terhadap substansi sejarah yang diajarkan di sekolah. Proses penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran sejarah akan mudah diterima dan dimaknai oleh peserta didik dengan pembelajaran dan peristiwa yang dekat dengan lingkungan mereka berada, salah satunya dengan pembelajaran sejarah local. Terkecuali sejarah nasional dan pembentukan identitas bangsa, proses sejarah yang dialami setiap teritori di Indonesia tidaklah monoton dan kaku sebagaimana muatan materi sejarah yang diajarkan, semisal proses sejarah yang terjadi pada masyarakat di Papua tidak sama dengan yang terjadi di Sumatera, Toraja, dan lainnya, begitu pula sebaliknya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan. Metode juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran. Melalui metode yang tepat, seorang peneliti

tidak hanya mampu melihat fakta sebagai kenyataan tetapi juga memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi melalui fakta itu. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepastakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain Penelitian kepastakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

Menurut Mardalis Penelitian Kepustakaan salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Masih menurut Mardalis, penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

Penelitian pustaka dilakukan dimulai dari informasi yang umum, baru kemudian diperoleh dari informasi yang lebih spesifik. Penelitian kepastakaan ini menggunakan sumber acuan pustaka yang menggunakan sumber primer, berasal dari hasil laporan penelitian ilmiah, seminar hasil penelitian, dan jurnal-jurnal penelitian. Sumber atau referensi primer adalah referensi yang didapat langsung dari sumber aslinya, bukan pendapat dari sumber primer yang dikutip oleh orang lain dalam sebuah karya tulis. Sehingga akan nampak keotentikan hasil karya tulis tersebut, karena lebih dekat dengan ‘sesuatu’ yang akan diteliti tersebut, atau dengan kata lain mencari objek penelitian kajian pustaka dari sumber pertamanya atau tangan pertama yang belum mengalami pencampuran dari sumber ke dua atau tangan ke dua.

### **III. PEMBAHASAN**

Fenomena ini terjadi karena dua alasan. Pertama, desentralisasi telah menjadi ruang bagi elit-elit di daerah untuk melakukan korupsi. Desentralisasi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan pendidikan, telah dibelokan menjadi ajang mengeruk kekayaan melalui dana APBN yang diperuntukkan untuk daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan belum menyentuh pada tataran substansi masalah untuk membangun pendidikan yang sesungguhnya karena kuatnya cengkeraman politik penguasa di tingkat lokal. Akibat cengkeraman politik elit, peran serta lembaga pendidikan baik Sekolah maupun lembaga penjaminan mutu pendidikan di daerah menjadi kurang efektif.

Sistem demokrasi secara otomatis menjadikan desentralisasi sebagai cara untuk menjalankan sistem ini. Desentralisasi sebagai upaya pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Desentralisasi pendidikan menjadikan pejabat dan pelaku di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri potensi yang dimiliki. Namun, ada banyak hal yang mengikuti perkembangan lari ini. Serta peluang, tantangan, hambatan dan peran aktif masyarakat menuju pendidikan yang berkualitas. Peluang yang terlihat nyata adalah potensi yang kita miliki. Seperti potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Peluang tersebut ditambah dengan dilaksanakannya MEA di tahun 2016. MEA menjadi arena kesuksesan tidak hanya di negara kita saja, tetapi tidak berhasil di arena internasional. Adapun kendala yang mengintai adalah kesiapan seluruh elemen pendidikan di negeri ini dalam menghadapi tantangan tersebut. Namun, kita tidak perlu takut karena kita memiliki sesuatu yang berbeda dari bangsa lain. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang berbeda dan khas bagi bangsa Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi pengembangan peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa berjangka panjang. Orientasi ini mutlak dilakukan oleh karena pendidikan diyakini sebagai sarana utama pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks itulah revitalisasi kebijakan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu bentuk revitalisasi itu ialah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan dari kebijakan yang semula sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sebagai konsekuensi logis dari bentuk desentralisasi pendidikan ialah munculnya kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (school based management). Dengan sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah tersebut diasumsikan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan juga peran serta masyarakat dan prakarsa lembaga pendidikan di tingkat mikro (sekolah) akan lebih meningkat (Ismail, 2018).

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap persoalan inti yang ada di madrasah sebagai akar penghambat dalam peningkatan mutu madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa madrasah dihadapkan pada posisi yang dilematis sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan semestinya madrasah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan madrasah, terlebih saat ini adalah era otonomi daerah. Pada era otonomi saat ini salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan Manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah menjadi lebih bermutu dengan memberikan wewenang yang luas kepada madrasah. Walaupun madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama, konsep MBS tetap dapat diimplementasikan berdasarkan atas kesesuaian MBS sebagai strategi mengatasi masalah madrasah. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang dukungan pemerintah kota Surabaya dan dampaknya dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. Pendidikan menjanggutanggung jawab pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan,

dan pembuatan kebijakan pendidikan diwilayahnya. Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menengah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota Surabaya, pengamat pendidikan, kepala sekolah dan guru di sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya; 3) Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan di tingkat sekolah, antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta partisipasi Orang tua.

Setiap kurikulum merupakan produk zaman, sehingga keberadaannya senantiasa merepresentasikan semangat zaman ketika kurikulum tersebut dikembangkan. Untuk mengetahui relevansi teori dan praktik (praxis) kurikulum dengan tuntutan semangat zaman diperlukan adanya evaluasi kurikulum. Melalui evaluasi kurikulum dapat diketahui apakah kurikulum mampu berkontribusi mempersiapkan peserta didik bertahan hidup dan pada saat bersamaan mampu membekali peserta didik untuk menjalani dan memuliakan kehidupan (*noble living*). Dalam realitas aktualnya, evaluasi kurikulum belum mendapat perhatian proporsional di kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk itu, upaya memahami dan menyebar-luaskan kesadaran mengenai signifikansi evaluasi kurikulum dalam reformulasi kebijakan pendidikan merupakan prasyarat dalam pembenahan pendidikan pada masa-masa mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi literatur mengenai dinamika dan kompleksitas teori dan praktik evaluasi kurikulum yang diharapkan dapat memberi secercah terang mengenai salah satu ranah kajian dalam disiplin ilmu kurikulum.

Desentralisasi dalam pendidikan merupakan wacana yang relatif baru dalam pendidikan nasional Indonesia. Isu-isu politik kontemporer dan sistem pemerintahan Indonesia yang masih mencari bentuk ideal pendidikan setelah tumbang sistem pemerintahan sentralistik pasca orde baru turut andil dalam mengangkat konsep ini. Desentralisasi tampaknya menjadi solusi alternatif dalam mengelola pendidikan nasional Indonesia. Diharapkan akan lebih banyak ruang bagi pemangku kepentingan melalui penerapan desentralisasi pendidikan. Idealnya, desentralisasi pendidikan dimaksudkan sebagai wujud komitmen para pembuat kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka memberdayakan pemangku kepentingan, juga untuk meningkatkan aksesibilitas dan relevansi pendidikan. Penerapan konsep desentralisasi tidak lepas dari faktor politik dan sosiologis.

Kajian Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih



banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.

Perubahan yang dilakukan terhadap isi kurikulum dapat mencakup ruang lingkup mulai dari penataan kurikulum, pemilihan materi pelajaran yang esensial atau penjabaran standar yang ada. Ketiga, perlu adanya perubahan pemahaman tentang diversifikasi dan pengembangan kurikulum. Pengembangan seperti itu harus dipahami sebagai pekerjaan rumit yang membutuhkan para profesional dan ahli untuk bekerja sama sebagai satu tim agar lebih memadai, efisien dan efektif (Sutjipto --, 2015). Dari sisi sumber daya manusia, daerah-daerah di Indonesia dinilai memiliki orang-orang yang berpengalaman dalam mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum. Kelima, diversifikasi kurikulum masih memerlukan berbagai regulasi sebagai landasan bagi tim pengembang untuk dapat menjalankan tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang memfasilitasi penyesuaian kurikulum dilakukan untuk mendorong keberagaman yang terus berkembang tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan berarti pelimpahan wewenang dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam merencanakan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan. Kewenangan tersebut memberikan ruang yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya alam dan manusia berdasarkan potensi daerah. Otonomi pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota setempat tetapi sampai pada tingkat sekolah sebagai ujung tombak pendidikan. Pengalihan kewenangan pada tingkat sekolah dapat membantu sekolah dalam membuat arah program perluasan berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Strategi merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak terkecuali mengenai pendidikan. Dalam hal ini penulis ingin memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen, yaitu: tata pemerintahan yang baik, internal dan efisiensi eksternal pendidikan. Melalui penerapan tiga pendekatan diharapkan dapat: (1) pengembangan kapasitas lembaga dan semua program di bidang pendidikan dapat dilaksanakan, (2) pengembangan kualitas pendidikan melalui input, proses, dan output mendasarkan pada otonomi daerah, (3) manfaat dan dampak hasil pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah.

Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan standarisasi nasional. Nilai lebih dari otonomi pendidikan dapat dilihat dari kemandirian SDM yang ada di daerah dalam mengelola pendidikan, dan masyarakat daerah dapat merasa memiliki hasil pembangunan

pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Menurut Hartono, Efek negatif yang mungkin menjadi nilai minus bagi pelaksanaan otonomi pendidikan adalah memungkinkan terjadinya arogansi daerah, yang disebabkan oleh perbedaan mencolok antar berbagai daerah yang ada. Realisasi otonomi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari manajemen berbasis sekolah, di mana pengambilan keputusan yang semula berada di Pusat/Kanwil/Kandep ke level sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, di mana masyarakat sebagai elemen sosial diberdayakan melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan membentuk komite sekolah.

Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran ditambah lagi dengan kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasi secara lengkap oleh birokrasi pusat. Oleh karena itu, dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu pada kebijakan nasional. Konsekuensi dari pelaksanaan program ini antara lain komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu: orang tua/masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya di satu sisi dan pemerintah (Kemendiknas) di sisi lainnya sebagai mitra dalam mencapai tujuan peningkatan mutu. Dengan demikian Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentralisasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Menurut (Kuswandi, 2011), pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan profesional. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan nasional tersebut merupakan esensi dari program manajemen mutu di bidang pendidikan. Dengan kata lain upaya untuk mendekatkan stakeholders pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut pemerataan dan perluasan layanan, mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan. Konsep manajemen mutu menetapkan bahwa fungsi manajemen yang dilaksanakan para manajer diarahkan agar semua layanan yang diberikan dapat memuaskan atau melebihi harapan kastemer (pelanggan), antara lain: siswa, orang tua, ataupun guru dan masyarakat (stakeholders). Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat, di mana

transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu.

Tujuan desentralisasi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan otonomi pemerintah daerah yang lebih besar untuk pertumbuhan pembangunan dalam berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan esensi desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusannya dalam lingkup daerahnya sendiri. Pola baru ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah sebagai bagian dari keinginan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih kompetitif dan pelayanan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pengambilan keputusan pemerintah daerah akan lebih membumi. Sejalan dengan desentralisasi pemerintahan, desentralisasi pendidikan mengandung upaya untuk mendekatkan pengambil keputusan kepada kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga pembangunan pendidikan akan lebih relevan dengan spesifikasi lokal, dan di sisi lain akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk pemberdayaan potensi masyarakat lokal. Pada akhirnya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan pendidikan Indonesia adalah mewujudkan peserta didik yang mampu membawa dampak baik bagi Indonesia, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai konflik, salah satunya adalah konflik penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS adalah program pemerintah pusat yang dananya berumber dari APBN. Dana BOS mengalami beberapa masalah yang signifikan, yaitu penyaluran dana yang kurang tepat sasaran, penyalahgunaan dana oleh pemerintah setempat, serta korupsi yang terjadi di komite sekolah. Dengan lahirnya Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pendidikan di Indonesia mengharapkan pendidikan lebih baik dengan sistem pendidikan yang desentralisasi. Desentralisasi Artinya pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh terhadap perkembangan pendidikan yang lebih baik karena pelimpahan wewenang sari Pusat Ke daerah. Sumber dana BOS bukan proses dari desentralisasi melainkan dekonsentrasi. Sehingga menimbulkan kebingungan terhadap pemisahan wewenang di bidang pendidikan.

Pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi mengimplikasikan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, relasi kewenangan kabupaten/kota, batasan kewenangan, dan dukungan kemandirian dan interdependensi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi sekolah dalam menjamin kualitas pendidikan dan berimplikasi pada kebutuhan akan sumber daya manusia dan juga keuangan. Nampaknya desentralisasi pendidikan perlu didefinisikan ulang. Pemberdayaan sekolah dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum untuk menjamin relevansi dan akuntabilitas pendidikan, peningkatan manajemen berbasis sekolah, pembiayaan mandiri, dan membangun jaringan antara sekolah dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dengan kultur dan geografis yang bermacam-macam. Kultur dan geografis yang bermacam-macam tersebut telah membentuk setiap daerah dalam keunikan dan potensi masing-masing. Keunikan dan potensi yang tergambar dari sumber daya dan kehidupan setiap daerah tersebut. Untuk mengoptimalkan dari setiap keunikan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten. Sumber daya manusia yang memahami setiap kesempatan dari keunikan dan potensi yang dimiliki daerah, khususnya sumber daya manusia lokal. Jalan keluar dari pemenuhan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan keunikan dan potensi adalah lembaga pendidikan. Mengacu dari bahwa daerah setiap daerah memiliki keunikan dan potensi sendiri-sendiri, maka dirubahlah sistem pendidikan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana pengelolaan lembaga pendidikan diserahkan kepada daerah masing-masing khususnya berkaitan dengan tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan seyogyanya mampu mendukung usaha pembangunan daerah setempat

Dalam penelitiannya Muttaqin mencoba mengukur pengaruh faktor kota dan variabel penjelas lainnya terhadap pencapaian pendidikan di Indonesia. Kami fokus pada rata-rata tahun sekolah sebagai indikator pencapaian pendidikan. Kami berhipotesis bahwa setelah desentralisasi, (1) pencapaian pendidikan lebih tinggi dibandingkan era sebelum desentralisasi, (2) variasi regional dalam pencapaian pendidikan akan meningkat, dan (3) kapasitas fiskal, tingkat urbanisasi, dan pembangunan akan lebih tinggi, semakin tinggi rata-rata tahun sekolah kotamadya. Yang terakhir juga diharapkan untuk kotamadya yang baru dibentuk beberapa tahun terakhir. Kami menguji hipotesis dengan data panel pada 5.541.983 responden yang dikumpulkan menjadi 3880 pengamatan yang bersarang di 491 kabupaten/kota yang bersarang di 32 provinsi sebelum dan sesudah era desentralisasi. Hasilnya mengungkapkan hal berikut. Pertama, setelah desentralisasi, lama sekolah sedikit meningkat, tetapi kemajuan dalam lama sekolah sedikit melambat. Kedua, variasi pencapaian pendidikan antar provinsi sedikit menurun, tetapi variasi antar kota meningkat. Ketiga, tingkat perkembangan kotamadya dan urbanisasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan capaian pendidikan, sedangkan kapasitas fiskal dan status menjadi kotamadya baru tidak berpengaruh signifikan terhadap perpanjangan lama sekolah. Temuan kami menunjukkan bahwa khususnya daerah pedesaan dan kota yang kurang berkembang telah tertinggal dalam upaya meningkatkan capaian pendidikan di Indonesia

Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan, seperti organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber pendanaan sekolah (--, 2010). Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas mendukung dengan memberikan kewenangan otonomi pendidikan langsung kepada setiap satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Mutu dan relevansi pendidikan ada pada setiap proses pentahapan pada satuan pendidikan. Komitmen Pemerintah

untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi masa depan bangsa harus segera diwujudkan melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru. Untuk memperkuat dukungan pengembangan pendidikan, diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan unggulan bertaraf internasional perlu dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara bertahap dan berkesinambungan di setiap daerah dengan menekankan relevansi dengan kebutuhan, ciri khas daerah/ keunggulan lokal

Konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dengan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, dan merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa indonesia. Pendidikan yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan daerah tempat dilangsungkan pendidikan. Unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Namun sebagian penulis juga skeptis dengan desentralisasi pendidikan, Ammirachman menyimpulkan bahwa desentralisasi di negara dengan sedikit pengalaman dalam otonomi daerah dan demokrasi tidak mungkin memberikan hasil yang diinginkan dalam hal kualitas sekolah, akuntabilitas dan efisiensi. Kajian mereka menunjukkan bahwa selain devolusi kekuasaan dan wewenang, semua model utama desentralisasi mencerminkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah. Para penulis mencatat kegagalan desentralisasi yang meluas dalam pendidikan, yang membantu mengkonsolidasikan stratifikasi sosial dan ketidaksetaraan desa-kota dalam pendidikan. Dalam penelitian Suryadarma tentang dampak korupsi terhadap efektivitas belanja publik di sektor pendidikan di Indonesia. Dua rangkaian hasil dipertimbangkan: angka partisipasi sekolah dan prestasi sekolah dalam ujian nasional. Pengeluaran publik tampaknya memiliki efek yang dapat diabaikan pada pendaftaran sekolah di daerah yang sangat korup, tetapi efek yang signifikan secara statistik, positif dan relatif besar di daerah yang kurang korup. Sebaliknya, belanja publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sekolah. Pelajaran utama dari makalah ini adalah bahwa mengucurkan lebih banyak dana publik ke dalam sistem pendidikan tidak mungkin membawa perbaikan kecuali disertai dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola di sektor tersebut. Selain itu, Toi menemukan fakta bahwa peningkatan anggaran sekolah meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan dan menghasilkan nilai ujian yang lebih tinggi dan angka putus sekolah yang lebih rendah. Namun, hasil positif tersebut ternyata kurang signifikan, dan hubungan antar faktor menjadi lebih lemah, selama periode setelah desentralisasi dimulai. Hal ini terutama terjadi pada kelompok sekolah yang tingkat anggarannya relatif kecil. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk

mempertimbangkan langkah-langkah yang ditujukan untuk memperbaiki kesenjangan antara sekolah dan daerah.

Meskipun demikian sebenarnya desentralisasi kurikulum dapat menguntungkan pengembangan sejarah lokal di setiap daerah yang jarang sekali dieksplorasi oleh para pegiat sejarah. Bagi kepentingan sejarah nasional, sejarah lokal tidaklah bersifat antagonis, justru akan memberi kontribusi positif. Seperti yang disampaikan Taufik Abdullah, bahwa sejarah lokal dengan pendekatan yang tidak bersifat involusi, yang hanya berkisar pada dirinya, makin memberi kemungkinan untuk merintis permasalahan baru dalam sejarah nasional. Dengan begini bukan saja visi tentang proses ke arah terwujudnya kesadaran nasional, sebagai syarat utama bagi kemantapan integrasi nasional dapat dipersegar, tetapi dan lebih penting lagi, dinamika sesungguhnya dari proses terjadi itu dapat dipahami.

Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah di suatu lokal tidak lagi sebagai sumber semata tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah. Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu peristiwa sejarah.

Saat ini pengajaran sejarah lokal dapat dikatakan bersifat hidden curriculum, bergantung kepada kreativitas guru dalam mengembangkan materi ajar. Hidden curriculum merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan sikap bawah sadar yang seringkali ditransmisikan secara halus lewat relasi-relasi sosial di sekolah dan kelas. Menurut Eric Margolis, konsep dari hidden curriculum menjembatani usaha sederhana untuk menunjukkan suatu keistimewaan sosial dari suatu kebudayaan atau menegaskan sebuah ruang khusus dari kreativitas dan kebebasan.

Pembelajaran sejarah dapat didukung dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar para peserta didik. Salah satu upaya untuk meningkatkan respon dan minat peserta didik terhadap pelajaran sejarah adalah menciptakan pola pembelajaran sejarah yang terkait dengan situasi lingkungannya. Kegiatan pembelajaran sejarah memerlukan medium mengembangkan rasa kepedulian dan ketertarikan akan ranah kedaerahan mereka, untuk selanjutnya menggali lebih dalam tentang apa yang pernah ada dalam lintasan masa lalu di daerahnya. Pemanfaatan situs sejarah lokal sebagai muatan pembelajaran tidak harus dengan menerapkan pembelajaran langsung seperti kemah budaya, lawatan sejarah, studi objek di lokasi situs sejarah dan sejenisnya yang menuntut guru dan siswa terjun langsung. Namun pembelajaran sejarah berbasis situs sejarah lokal bisa diefisienkan dengan memindahkan situs-situs sejarah tersebut ke dalam sebuah media pembelajaran untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di kelas.

Tantangan pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal adalah bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan historiografi sejarah lokal dan sumber sejarah, hal ini menjadi kendala utama dalam pengimplementasian kurikulum Sejarah lokal di daerah-daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 25 Tahun 1999 di Indonesia, membagi desentralisasi menjadi dua kategori, UU/22 menyangkut desentralisasi administratif, sementara UU/25 menyangkut administrasi keuangan. Di bidang pendidikan atau sekolah, sejak desentralisasi, pendidikan akan menjadi Di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah, beban pemerintah daerah saat ini adalah ditambahkan oleh kewajiban untuk membiayai pengeluaran pendidikan. Misalnya, gaji guru akan dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah daerah, yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat.

Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu alasan utama dalam penerbitan undang-undang pendidikan baru No. 23 Tahun 2003. Selain itu tujuan lainnya adalah memberdayakan masyarakat partisipasi dalam penyediaan pendidikan berbasis otonomi. Oleh karena itu, ini juga bagian dari sistem desentralisasi baru. Namun, isu desentralisasi pendidikan tidak secara khusus dibahas dalam undang-undang yang baru, namun mengacu pada undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999. Dasar hukum tersebut menyuratkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia menyediakan layanan pendidikan.

Ketika undang-undang nomor 22 Tahun 1999 disahkan, terjadi perubahan fundamental dalam pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, termasuk desentralisasi pendidikan. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam memperkuat pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Artinya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional seperti masalah relevansi pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi dalam manajemen pendidikan.

Menurut Sjamsi Pangandaran, penerapan desentralisasi pendidikan membawa sejumlah implikasi:

1. Memperkuat rujukan preferensi nilai yang dianggap strategis dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan anak untuk dapat hidup dan berinteraksi di masyarakatnya. Setiap individu dan masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi preferensi baik pribadi maupun lembaga. Nilai-nilai itu akan menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu ataupun masyarakat, serta menjadi kekuatan yang mengintegrasikan kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan.

2. Kedua, desentralisasi pendidikan akan meningkatkan kapasitas sekolah seperti mutu intake, relevansi program, inovasi pendidikan, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

3. Ketiga, desentralisasi pendidikan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.

4. Keempat, desentralisasi pendidikan dapat memperkuat hubungan fungsional pendidikan dengan perkembangan masyarakat, dalam arti relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

5. Kelima, desentralisasi pendidikan dapat menumbuhkan manajemen yang efisien, efektif, dan produktif.

6. Keenam, desentralisasi pendidikan dapat memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik pribadi maupun kelembagaan.

7. Ketujuh, desentralisasi pendidikan dapat memperkuat kebermaknaan fungsi kelembagaan institusi pendidikan, dan dengan demikian memperkuat pula kemandirian institusi pendidikan di daerah

Jika kita berkaca pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diterjemahkan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI. Burnett mendefinisikan desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan masyarakat local.

Terlepas dari permasalahannya. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural ini dapat memanfaatkan sejarah lokal untuk kepentingan netralisasi pengaruh negatif globalisasi. Namun, Sejarah Nasional Indonesia tetap mesti diberikan porsi tertentu agar fungsi utama pengajaran Sejarah untuk penanaman sikap nasionalisme dan menjaga integrasi nasional tetap diperhatikan. Kelebihan pembelajaran sejarah lokal di sekolah adalah kemampuannya membawa siswa kepada situasi riil dalam lingkungannya, pembelajaran sejarah lokal dapat menerobos dan menjembatani antara apa yang terjadi dengan dirinya dan lingkungannya. Hal ini karena lingkungan sosial sekitar siswa menjadi sumber pembelajaran.

Dasar pengembangan materi sejarah lokal merujuk pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang didalamnya untuk memuat materi muatan lokal yang harus diajarkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan keadaan daerahnya (Purwasatria, 2016). Selain itu undang-undang Sisdiknas juga telah menegaskan kembali pentingnya menggali khazanah di setiap daerah dengan memberikan ruang di kurikulum sekolah melalui mata pelajaran Muatan Lokal. Namun terkhusus mata pelajaran Sejarah, terdapat urgensi pula untuk menyertakan pembelajaran sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah.

Itikad untuk melakukan reformasi dalam kurikulum sejarah pernah diutarakan oleh pemegang kebijakan. Mengutip wawancara [tribunnews.com](http://tribunnews.com) dengan Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud pada tahun 2013: Materi sejarah lokal atau daerah mendapat peluang luas untuk dipelajari dalam mata pelajaran Sejarah peminatan di jenjang SMA. Daerah diminta mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman siswa. Pada pelaksanaan Kurikulum 2013, struktur kurikulum Sejarah dibagi dua, yaitu sejarah umum (nasional) yang dipelajari semua siswa dan sejarah peminatan. Materi sejarah lokal bisa dikembangkan di sejarah peminatan. Wacana ini sangat bagus untuk menjadi solusi diberikannya



ruang terhadap pendidikan sejarah lokal. Namun sampai sekarang wacana ini masih belum terlaksana. Menurut pendapat penulis tidak semua daerah memiliki sumber pembelajaran sejarah lokal yang memadai baik itu situs sejarah maupun dokumen ilmiah yang menjelaskan tentang sejarah lokal di setiap daerah.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, desentralisasi pendidikan memberikan landasan bagi pemerintah daerah meliputi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mengatur dan mengelola pendidikan berada di wilayahnya. Desentralisasi pendidikan memberikan otoritas di daerah untuk menerapkan sejarah lokal di kurikulum mata pelajaran sejarah, sebagaimana penerapan mata pelajaran muatan lokal, serta memotivasi para pegiat sejarah dan budaya untuk kembali mengeksplorasi sejarah dan kearifan lokal di masing-masing daerahnya.

Selain itu dalam konteks persiapan dan penerapan kurikulum sejarah lokal dapat memanfaatkan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru Sejarah (KKG) sebagai sarana penerapan sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran sejarah di daerah. Berdasarkan Standar Pengembangan MGMP dan KKG, fungsi dari forum tersebut adalah penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyelenggaraan seminar, dan lain-lain (Kemendiknas, 2008). Hal ini memungkinkan MGMP dan KKG dimanfaatkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan sejarah lokal di daerah. Meskipun realisasi ide ini terbilang cukup sulit akibat beban profesi guru juga relatif banyak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berangkat dari beberapa kekurangan dari kurikulum sejarah saat ini serta minimnya muatan materi sejarah lokal, menjadikan perlunya penerapan Sejarah Lokal dalam mata pelajaran sejarah di setiap daerah. Aspek lokalitas akan sangat membantu peserta didik untuk dapat memahami tujuan pembelajaran sejarah, karena memiliki kaitan langsung dengan identitas dan budaya masyarakat lokal. Penerapan sejarah lokal bukan berarti mengganti secara keseluruhan kurikulum pendidikan Sejarah nasional kepada lokal, namun lebih kepada memberi ruang bagi Sejarah Lokal sebagai pengayaan dari tujuan kurikuler utama yaitu Sejarah Nasional Indonesia. Hambatan utama dari penerapan Sejarah Lokal secara menyeluruh di Indonesia saat ini adalah tidak semua daerah memiliki sumber sejarah dan historiografi yang memadai.

Desentralisasi pendidikan sebagai pelimpahan wewenang kebijakan pendidikan kepada otoritas daerah memberikan peluang bagi penerapan Sejarah lokal dalam kurikulum mata pelajaran Sejarah di daerah. Kebijakan khusus dapat dilimpahkan kepada otoritas daerah dan komunitas pegiat budaya dan kesejarahan di daerah untuk mengembangkan sejarah di daerahnya demi kepentingan pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. *Educational Research for Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1007/s10671-010-9081-6>
- Alfian, M. (2011). *Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi*. Jurnal Khazanah Pendidikan, Volume III No.2 Tahun 2011.
- Amin, S. (2011). *Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Melalui Pembelajaran Sejarah Jalur Formal dan Informal pada Siswa SMA di Kudus Kulon*. Jurnal Paramita Volume 21 No. 1 tahun 2011: Universitas Negeri Semarang.
- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*.
- Azinar, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pedagogy*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aziz, A. Z. (2015). Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *El-Tarbawi*. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5>
- Badaruddin., & Lalu, M. (2016). *Integrasi Sejarah Lokal dalam Paket Pengajaran Sejarah Nasional*. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia ISBN; 978-602-60420-0-2: Kajian Muatan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah di Kurikulum 2013: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Baihaqy, A. (2004). *Decentralization in Indonesia: The Possible Impact on Education (Schooling) and Human Resource Development for Local Regions*. The 2nd International Conference on Indonesia: Decentralization and Structural Reformation, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro, Semarang, 7-8 July 2004
- Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437>
- Carr, H. E. (1961). *What is History*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Cepy, S. (2006). *Meneropong Desentralisasi Pengeioloah Pendidikan dengan Kacamata Politik Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan No. 01/Tli. II/April 2006 El: Universitas Negeri Yogyakarta
- Christoper, B. (2003). *Local Responses to Decentralization in Indonesia*. Comparative Education Review, Vol. 47, No. 2 (May 2003), pp. 184-216. Comparative and International Education Society: University of Chicago Press.
- Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.654485>
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>
- Handayani, D. (2017). Konflik Desentralisasi Di Bidang Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Biaya Operasional Sekolah (Bos) Di Indonesia. Desi. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Hartono. (2015). Otonomi Pendidikan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*.
- Hassan, H. (2008). *Problematika Pendidikan Sejarah*. Handbook Pendidikan Sejarah: FPIPS-UPI.
- Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'*. <https://doi.org/10.30984/jpii.v2i2.541>
- Kemendiknas Republik Indonesia. (2008). Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*.
- Margolis, Eric & Partners. (2001). *Hidden Curriculum in Higher Education*. New York and London: Routledge.
- Muatan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah di Kurikulum 2013: Universitas Negeri Yogyakarta
- Mukhsin, M. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan. *Jupe : Jurnal Pendidikan Mandala*. <https://doi.org/10.36312/jupe.v4i5.845>
- Musanna, A. (2012). Quo Vadis Praksis Evaluasi Kurikulum: Studi Pendahuluan terhadap Ranah Kurikulum yang Terlupakan\*). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.64>
- Muttaqin, T., Van Duijn, M., Heyse, L., & Wittek, R. (2015). The impact of decentralization on educational attainment in Indonesia. In *Decentralization and Governance in Indonesia*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_4)
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Pangandaran, Sjamsi. (2004). *Desentralisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sekolah*. Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 11 No.2 Tahun 2004: Universitas Negeri Malang.
- Pasandaran, Sjamsi. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Masalah Pemberdayaan Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Sa'ud, U. S. (2013). Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sarnoto, Ahmad Zain. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*.
- Sejarah Lokal Mendapat Tempat di Kurikulum Pendidikan* oleh Tribunnews.com: <http://wartakota.tribunnews.com/2013/09/16/sejarah-lokal-mendapat-tempat-dalam-pendidikan>. 16 Oktober 2013
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan. *Journal of Islamic Education Management*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Supriyanta, S. (2018). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Cakrawala*. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85>
- Syafi'i, S, Amirrachman, A. & Welch, A. (2009). Decentralising Indonesian Education: The Promise and the Price. In *Decentralisation, School-Based Management, and Quality*. [https://doi.org/10.1007/978-90-481-2703-0\\_8](https://doi.org/10.1007/978-90-481-2703-0_8)
- Taufik, Abdullah. (2005). *Sejarah Lokal di Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta.
- Wasino & Purnamasari, Iin. (2011). *Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Situs Sejarah Lokal di SMA Negeri Kabupaten Temanggung*. Jurnal Paramita Volume 21 No.2 Tahun 2011: Universitas Negeri Semarang.
- Widodo, N. E, Dan Bima Wahyu. (2016). Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.866>
- Yuliana, Anisa. (2016). *Pembelajaran Sejarah Lokal, Nilai-Nilai dan Aplikasi*. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia ISBN; 978-602-60420-0-2: Kajian